

Politik Pendidikan Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia

Rahmad. S ✉ Pascasarjana Uin Imam Bonjol Padang

Zulmuqim Pascasarjana Uin Imam Bonjol Padang

Muhammad Zalnur Pascasarjana Uin Imam Bonjol Padang

✉ Maddhd98@gmail.com

zulmuqim@yahoo.co.id

muhammadzalnur@uinib.ac.id

Abstract: Education is an effort to develop the human potentials of students, both their physical potential, their creative potential, taste and intention, so that this potential becomes real and can function in their life journey. The politics of education in question is manifested in the government's strategic policies in the field of education. The expected education politics is, of course, educational politics that side with the small or poor people. This study uses library research methods (Library Research). Which data previously collected was based on library data and did not use empirical tests. The politics and power of a country holds the key to the success of education. In the context of democratization and decentralization development in Indonesia, the role of executive and legislative politics to advance education is enormous. The realm of politics and power must be able to realize an education system that educates and enlightens the civilization of this nation. A nation with bad educational politics will have poor educational performance. On the other hand, a country with good educational politics will also have good educational performance. Since independence until the reform era, the political journey of national education has undergone three changes, namely in the Old Order era, in 1954, in the New Order era, and currently in the reform era.

Keywords: political education, islamic education, indonesia

Abstrak: Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Politik pendidikan yang dimaksud termanifestasikan dalam kebijakan- kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan yang diharapkan tentunya politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil atau miskin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yang mana data-data yang dikumpulkan sebelumnya berdasarkan data kepustakaan dan tidak menggunakan uji empirik. Politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus. Semenjak kemerdekaan sampai dengan era reformasi perjalanan politik pendidikan nasional telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu di era orde lama, pada tahun 1954, di era orde baru, dan saat ini di era reformasi.

Kata kunci: politik pendidikan, pendidikan islam, indonesia

Received: Maret 2023

Approved: Maret 2023

Published: Juni 2023

Citation: S, Rahmad, Zulmuqim and Muhammad Zalnur. "Politik Pendidikan Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia." *Kaisa: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 3, no. 1 (Juni 30, 2023): 21–32.



Copyright ©2023 Rahmad S., Zulmuqim, Muhammad Zalnur.

Published by Jurusan Tarbiyah dan Keguruan STAIN Bengkalis.

This work is licensed under the [CC BY NC SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis. guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Selanjutnya Budaya politik seseorang atau masyarakat sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan seseorang atau masyarakat.

Hal itu bisa dipahami mengingat semakin tinggi kesempatan seseorang atau masyarakat mengenyam pendidikan, semakin tinggi pula seseorang atau masyarakat memiliki kesempatan membaca, membandingkan, mengevaluasi, sekaligus mengkritisi ruang idealitas dan realitas politik. Maka, kunci pendidikan politik masyarakat sebenarnya terletak pada politik pendidikan masyarakat.

Politik pendidikan yang dimaksud termanifestasikan dalam kebijakan- kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan yang diharapkan tentunya politik pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil atau miskin. Bagaimanapun, hingga hari ini masih banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat SD sekalipun. Masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas atau bahkan tidak memiliki gedung yang representatif atau tak memiliki ruang belajar sama sekali. Masih banyak sekolah yang sangat kekurangan guru pengajar. Masih banyak pula guru (honorar) yang dibayar sangat rendah yang menyebabkan motivasi mengajarnya sangat rendah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*). Yang mana data-data yang dikumpulkan sebelumnya berdasarkan data kepustakaan dan tidak menggunakan uji empirik. Jadi, dalam studi kajian pustaka ini merupakan analisis teks secara keseluruhan subtansinya dan diolah secara filosofis dan teoritis.

Oleh sebab itu, maka penelitian ini secara keseluruhan terpaku pada kajian pustaka atau literatur yang ada, dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode pustaka ini merupakan suatu cara pencarian data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, jurnal, dan lain sebagainya.¹

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 231

PEMBAHASAN

A. Konsep Politik Pendidikan

Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Dalam kamus berarti *acting or judgeing wisely, welljudged prudent*. Kata politik diambil dari kata latin *politicus* atau bahasa Yunani (*Greek*) *politicos* yang bermakna *relating to a citizen*. Kata itu berasal juga dari kata *polis* yang searti dengan *city* "kota". *Politic* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu Negara atau terhadap Negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik

Dalam istilah, kata politik, pertama kali dikenal dari buku Plato yang berjudul *politeia*, yang dikenal juga dengan Republik. Berikutnya muncul karya Aristoteles yang berjudul *Politeia*. Kedua karya itu dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari sekian definisi yang ada paling tidak dapat ditemukan dua kecenderungan pendefinisian politik. Pertama, pandangan yang mengaitkan politik dengan Negara, yakni dengan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Kedua, pandangan yang mengaitkannya dengan masalah kekuasaan, otoritas dan atau dengan konflik.²

Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata *didik* yang mendapat awalan *pen-* dan akhiran *-an*, dan berarti perbuatan, hal, dan cara.³ Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan merupakan tuntutan bagi pertumbuhan anak. Artinya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.⁴ Maka, politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu Negara dalam bidang pendidikan yang berupa perturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara.⁵ Pendidikan merupakan bagian kebutuhan mendasar manusia (*al-hâjat al-asasiyyah*) yang harus dipenuhi oleh setiap manusia seperti halnya pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan perumahan. Pendidikan adalah bagian dari masalah politik (*siyâsah*) yang diartikan sebagai *ri'âyah asy-syu'ûn al- ummah* (pengelolaan urusan rakyat) berdasarkan ideologi yang diemban negara.

Berdasarkan pemahaman mendasar ini, politik pendidikan (*siyâsah atta'îm*) suatu negara sangat ditentukan oleh pandangan hidup yang diemban negara tersebut. Faktor inilah yang menentukan karakter dan tipologi masyarakat yang dibentuknya. Dengan demikian, politik pendidikan dapat dipahami sebagai strategi pendidikan yang dirancang negara dalam upaya menciptakan kualitas human resources (sumberdaya manusia) yang dicita-citakan.

B. Tinjauan Historis Kebijakan Pemerintahan di Bidang Pendidikan

1. Pendidikan pada masa Kolonialisme Belanda dan Jepang

Menurut Leirisa yang dikutip oleh Asrori untuk lebih mendalami pergeseran kebijakan pendidikan penguasa di Indonesia telah diawali dengan kebijakan pendidikan pada era kolonial Belanda.⁶ Pada masa tersebut, pendidikan diorientasikan untuk mencetak tenaga produktif yang sangat dibutuhkan bagi pengembangan politik eksploitasi negara jajahan. Bagi kolonial, pendidikan rakyat

² Ahmad Zain Sarnoto, *Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia*, *EDUCHILD*. Vol.01 No.1 Tahun 2012, Hal. 31-32

³ Abuddin Nata. *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), Hal. 8

⁴ Zurinal Z dan Wahdi Sayuti. *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hal.

⁵ Husni Rahim. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Ciputat: Logos Wa cana Ilmu), Hal. 9

⁶ Mohammad Asrori, *POLITIK DAN PENDIDIKAN (Tinjauan Historis Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia)*, *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015, Hal. 55

sebagai problem bak buah simalakama. Apabila pendidikan tidak dikembangkan, kolonial kekurangan tenaga ahli yang mendukung tujuan politisnya. Di sisi lain, pendidikan dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan sumber daya manusia yang dapat menjadi bumerang bagi kekuasaan kolonial.

Menurut Tilaar yang dikutip oleh Asrori, sistem tersebut berbeda dengan era pendudukan Jepang. Jepang memfokuskan pendidikan pada upaya penghapusan pengaruh budaya asing dan diganti dengan kebudayaan Jepang serta mengibarkan semangat Patriotisme Asia Timur Raya. Hal ini disebabkan karena Jepang memiliki misi untuk menyatukan bangsa Asia di bawah kepemimpinan Jepang. Perombakan kurikulum yang ditempuh adalah dengan memberlakukan pendidikan yang lebih bersifat praktis bukan intelektualistik serta mendekatkan pendidikan dengan kebutuhan riil rakyat dan diberlakukannya sistem kurikulum 6+3+3 yang berlanjut hingga saat ini.⁷

2. Pendidikan pada masa Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan, pemerintahan RI belum secara maksimal mengupayakan pendidikan pada rakyatnya, karena beban politis yang besar serta perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang sangat menguras tenaga maupun pikiran pemerintah dan rakyat. Namun, dibalik gejala politik yang cukup berat itu, pendidikan tetap dilaksanakan dalam kondisi yang elementary. Era pemerintahan Soekarno mulai menemukan jati diri kebijaksanaan politiknya pada tahun 50-an yang bernuansa sosialis sebagaimana yang terdapat dalam keputusan MPRSno II/MPRS/1960 tentang manusia sosialis, maka pembangunan pendidikan merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional semesta berencana yaitu tatanan masyarakat adil berdasarkan Pancasila. Pendidikan dikemas sebagai alat revolusi dalam suasana berdikari mengharuskan pembantingan setir dalam segala hal sehingga tujuan pendidikan untuk melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis adil dan makmur dapat terwujud. Menurut Tilaar (1985: 99-101), jiwa kurikulum pendidikan yang disosialisasikan yaitu: 1) Semangat mengemban amanat pendidikan rakyat secara gotong royong; 2) Semangat Demokrasi Terpimpin; 3) Semangat cinta Bangsa; dan 4) Semangat Kepercayaan kepada Tuhan YME.⁸

3. Sistem Pendidikan pada Era Soeharto

Seiring dengan pembangunan pada sektor perekonomian yang melonjaknya kebutuhan tenaga terampil dan SDM yang handal, maka pada pembangunan jangka panjang tahap pertama dari pelita satu hingga keempat, pendidikan Indonesia berorientasi pada human development. Sistem ini didasarkan atas kesinambungan antara pendidikan dan tenaga kerja sebagai jawaban atas ketidaksinambungan antara output pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja untuk mengisi sektor perekonomian yang berkembang sangat cepat. Sistem yang dikenal dengan link and match ini berpengaruh pada dibukanya sekolah kejuruan yang akan menghasilkan tenaga terampil tingkat menengah serta pelatihan ketrampilan dan kursus.

Tilaar mengatakan bahwa pada pembangunan jangka panjang tahap kedua sebagaimana tertuang dalam rumusan GBHN 1993 yang menegaskan bahwa PJP II merupakan masa kebangkitan nasional kedua yang tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan kemampuan sendiri untuk mewujudkan kehidupan yang sederhana. Dengan rumusan ini, sistem pendidikan diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat manusia serta peningkatan kualitas SDM.⁹ Kurikulum yang disusun berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai

⁷ *Ibid*, Hal. 56

⁸ H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, (Bandung: Rosda Karya, 1999), Hal. 99-101

⁹ *Ibid*, Hal. 142

dengan tuntutan zaman dan tahapan pembangunan. Kurikulumnya menonjolkan tiga hal yaitu: 1) kurikulum yang fleksibel; 2) kurikulum yang mengembangkan sikap kemanusiaan; 3) kurikulum yang mengembangkan sikap kewiraswastaan.

Menurut Suryadi, salah satu upaya pemerataan pendidikan pada era ini adalah dicanangkannya wajib belajar 9 tahun dengan melibatkan peran swasta yang begitu besar untuk memberikan kontribusi bagi pencerdasan bangsa.¹⁰ Aplikasi kurikulum pendidikan pada PJP II cenderung sentralistik yang berdampak pada pengabaian potensi dan budaya daerah. Sentralisasi ini memicu pada problem ketertinggalan berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Sisi buram pada produk pendidikan PJP I dan II adalah disorientasi tujuan pendidikan dari mencetak manusia Indonesia yang seutuhnya menjadi berorientasi pada pengembangan iptek namun terjebak pada pendewaan terhadap ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan robot-robot yang produktif namun tanpa memiliki moral dan miskin iman, atau manusia work-Aholic yang gersang dari kehangatan kemanusiaan.

4. Pendidikan pada era Reformasi

Menurut Surya, pada era reformasi yang berbarengan dengan pergeseran perjalanan kehidupan abad ke 21-an telah mendapatkan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan bernegara. Kalau abad 20 dicirikan sebagai abad revolusi industri kedua, maka era 21-an dicirikan sebagai era globalisasi dan keterbukaan. Keduanya dapat diidentikkan sebagai abad yang penuh perubahan cepat, diskontinuitas dan krisis berkepanjangan. Para futurolog jauh-jauh hari telah mengingatkan akan adanya tantangan yang maha dahsyat ini antara lain, Tofler, Francis Fukuyama dan John Naisbit yang mengingatkan bahwa bangsa berkembang termasuk Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi perhelatan global.¹¹

Kondisi sosial politik Indonesia mengharuskan pemerintah pada masa Habibie untuk menggelogori peningkatan pendidikan sains dan teknologi sebagai upaya melawan penjajah di sektor iptek, akan tetapi proyek tersebut terkoyak dengan perubahan konstelasi perpolitikan yang begitu cepat. Sementara itu, pada masa Gus Dur keberhasilan yang mencolok justru terjadi pada pendidikan berpolitik di mana kebebasan dibuka seluas-luasnya yang berdampak pada amunisi bagi pemerintahan sendiri dengan jatuhnya Gus Dur dari kekuasaan. Pada pemerintahan Megawati dan dilanjutkan pemerintahan Indonesia bersatu disusun pendidikan berbasis kompetensi yang tidak lagi sentralistik namun lebih memberikan kesempatan pada pengembangan potensi dan budaya daerah, di satu sisi mengacu pada kompetensi atau kemampuan dan ketrampilan pada tiga aspek pendidikan yaitu, kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Terakhir, pada masa pemerintahan SBY, juga menginginkan upaya peningkatan kualitas pendidikan anak bangsa ini. Ketika pada era pemerintahan sebelumnya, telah terdapat konsensus bersama dalam memberlakukan rekonstruksi kurikulum dengan KBK-nya, namun dalam era sekarang ini juga terdapat perbaikan-perbaikan kurikulum dengan KTSP-nya, yang sekarang sudah masuk dalam lini birokrasi pendidikan di Indonesia masih dalam proses. Sesungguhnya, KBK dan KTSP yang menjadi ruhiyah memiliki kemiripan, yang secara substansi memiliki banyak persamaan dalam menghasilkan output yang berkualitas.

Dari sisi lain, pemerintah SBY telah mencanangkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan target 20% dalam kerangka upaya peningkatan kualitas pendidikan kita, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Namun pada

¹⁰ Suryadi, Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar, (Bandung: Rosda Karya, 1994), Hal. 237

¹¹ Djoko Surya, Membangun Visi ke Depan: Refleksi atas Masalah Pembangunan dalam Tantangan Pembangunan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1997), Hal. 3-4

proses pelaksanaannya sampai saat ini masih terdapat tarik menarik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

C. Kebijakan Politik Pendidikan Pemerintahan Indonesia

Kebijakan politik pendidikan Indonesia secara umum dapat dibagi ke dalam empat periode. Pertama kebijakan politik pemerintahan pada masa Pra-kemerdekaan; Kedua, kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama; Ketiga kebijakan politik pemerintahan Indonesia masa Orde Baru; dan keempat kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada Orde Reformasi.¹²

1. Kebijakan Politik Pemerintahan Masa Pra-kemerdekaan

Pada masa pra-kemerdekaan kebijakan politik pemerintahan berada di tangan penjajah Belanda. Pada masa itu Belanda menerapkan politik Diskriminatif terhadap rakyat jajahannya, terutama terhadap ummat Islam. Hal ini baru berubah, setelah Belanda mendapatkan tekanan dari dunia internasional. Belanda mulai memberikan kesempatan secara terbatas kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk tenaga kerja yang akan diperkerjakan di pemerintahan Belanda.¹³

Belanda sangat mencurigai dan tidak suka akan keberadaan pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, dsb. Dalam keadaan demikian, maka politik pendidikan yang diterapkan ummat Islam adalah bersikap non-kooperatif dengan Belanda. Ummat Islam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan sistem sekolah, yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam, dll. Di lembaga tersebut diajarkan pengetahuan agama, pengetahuan umum, nasionalisme, patriotisme, dll.

2. Kebijakan Politik Pemerintahan Masa Orde Lama

Pada masa ini penekanan kebijakan pendidikan pada isu nasionalisasi dan ideologisasi. Penekanan pada kedua bidang tersebut tidak lain karena masa tersebut masa krusial pasca kemerdekaan dimana banyak konflik yang mengarah pada separatisme dan terjadi interplay (tarik ulur) antara pihak yang sekuler dengan agamis. Implikasi dari kebijakan politik pendidikan pada waktu itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan berpatriot pancasila. Kebijakan politik tersebut sejatinya berupaya menjadi "win-win solution" dengan mengakomodasi semua kepentingan. Di sini terjadi pengakuan terhadap keanekaragaman baik budaya, seni, maupun agama. Pada dasarnya upaya membangun nasionalisme melalui pendidikan relatif berhasil, hanya saja kurang diimbangi dengan kebijakan yang lain sehingga kemelut bernegara selalu ada di masa tersebut. Pada masa ini politik pendidikan Islam lebih diarahkan pada upaya memperbaharui dan memperbanyak lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntutan zaman. Namun, kegiatan ini belum terlaksana sepenuhnya, mengingat Indonesia yang baru saja merdeka masih berada dalam keadaan labil dan mencari bentuk sesungguhnya. Selain itu adanya kekuatan ideologis yang mempengaruhi situasi politik dan kebijakan pemerintah juga ikut mempengaruhi politik pendidikan Islam pada masa itu. Pemerintah berada dalam tiga tekanan ideologi yaitu ideologi nasionalis, komunis, dan islamis.¹⁴ Jadi, politik pendidikan Islam pada masa ini difokuskan pada upaya membendung paham komunis

3. Kebijakan Politik Pemerintahan Masa Orde Baru

Dengan dikeluarkannya undang-undang sistem pendidikan ditahun 1989. Berbeda dengan kebijakan di era orde lama, kebijakan di era orde baru memberi penekanan pada sentralisasi dan birokratisasi.

¹² *Ibid*, Hal. 11

¹³ Abuddin Nata. *Op., cit*, Hal. 12

¹⁴ *Ibid*, Hal. 13

Di masa ini jalur birokrasi sebagai sebuah kepanjangan tangan dari pusat sangat kental. Orang-orang daerah didoktrin sedemikian rupa sehingga menjadi kader-kader yang 'yes man', selalu patuh buta terhadap kepentingan pusat. Akibat yang terjadi dari kebijakan ini adalah matinya daya kritis, daya kreatif dan daya inovatif, yang ada hanyalah birokrat yang "sendikho dhawuh". Bahkan sistem pada masa ini berhasil membunuh idealisme. Orang-orang atau cendekia yang idealis, kritis, dan inovatif tiba-tiba memble ketika masuk pada jalur birokrasi.

Disadari bahwa sistem pendidikan nasional pada masa itu sebab kuatnya intervensi kekuasaan sangat mewarnai di setiap aspek pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional pada masa orba, muatan kurikulumnya sempat dimanfaatkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Beberapa pelatihan di sekolah-sekolah atau instusi-institusi pendidikan pada umumnya lebih mengenalkan indoktrinasi ideologi penguasa. Praktek penataran P4 merupakan salah satu bukti riil dari indoktrinasi ideologi penguasa pada waktu itu.¹⁵

Di era ini pula terjadi penyeragaman-penyeragaman sehingga budaya daerah, seni daerah, dan kearifan lokal mengalami nasib yang tragis, bahkan banyak yang telah mati. Yang tersisa hanyalah seni dan budaya yang sifatnya mondial. Bahkan istilah Bhinneka Tunggal Ika yang sejatinya bermakna berbeda-beda tetapi satu jua telah dimaknai menjadi sesuatu entitas yang seragam, ya serba seragam.

Politik pendidikan pada masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Ada beberapa karakteristik pemerintahan Orde Baru yang kurang kondusif bagi pengembangan pendidikan Islam, karakter tersebut antara lain:

- a) Pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang kuat dan dominan
- b) Pemerintahan Orde Baru melengkapi dirinya dengan aparat keamanan represif serta aparat politik-ideologis untuk melestarikan dan mereproduksi kekuasaannya
- c) Pemerintahan Orde Baru sejak awal mendapatkan dukungan dari Kapitalisme internasional.

Politik Pendidikan Orde Baru mengacu kepada GBHN yang mulai diberlakukan sejak tahun 1973-1998. Kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan adalah:

- a) Melanjutkan program pemberantasan buta huruf
- b) Melaksanakan pendidikan masyarakat agar memiliki kemampuan, mental, spiritual, dan keterampilan
- c) Mengenalkan pendidikan luar sekolah
- d) Pembinaan generasi muda
- e) Dilaksankannya proram orang tua asuh mulai tahun 1984.

Pada masa Orde Baru muncul SKB 3 menteri yang secara formal sudah memberi pengakuan kesetaraan, namun di lapangan masih belum diterima penuh, masih banyak perlakuan diskriminatif dalam penerimaan lulusan madrasah. Barulah ketika UU no.2 tahun 1989 madrasah dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dan kurikulumnya sama persis dengan kurikulum sekolan plus agama.¹⁶

4. Kebijakan Politik Pemerintahan Masa Reformasi

Pemerintahan Reformasi ditandai oleh semakin berkembangnya wacana demokrasi. Mahasiswa sudah memiliki kebebasan yang luar biasa. Mereka dapat merancang berbagai program sesuai dengan aspirasi yang berkembang.¹⁷

¹⁵ Mu'arif, *Liberalisasi Pendidikan. Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2008), hal:13

¹⁶ Husni Rahim. Op.cit, hal.90

Kebijakan ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional N0 20 tahun 2003. Di era reformasi ini penekanannya terletak pada desentralisasi dan demokratisasi. Kewenangan yang semula terletak di pusat dan berjalan secara *top-down* diubah dengan memberi kewenangan daerah yang lebih luas sehingga pola yang berjalan adalah *bottom-up*.

Regulasi yang relatif longgar di era reformasi ini ternyata belum memberi angin segar bagi dunia pendidikan, bahkan banyak potensi untuk diselewengkan dengan mengambil dalih demokratisasi dan desentralisasi. Demokrasi telah menjadi kebebasan dan desentralisasi daerah telah menjadi keangkuhan daerah.

Kebijakan politik yang paling di sorot pada masa ini adalah kebijakan-kebijakan tentang otonomi daerah dalam bidang pendidikan, penerapan kurikulum yang berganti-ganti, hingga yang diterapkan saat ini yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan pro dan kontra yang terjadi pada pelaksanaan Ujian Nasional.

a. Otonomi Daerah dalam bidang pendidikan

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera.

Desentralisasi bidang pendidikan dimulai dengan keluarnya UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian ditindak lanjuti dengan PP No. 20 tentang Perimbangan Keuangan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang sektor-sektor yang didesentralisasikan dan yang tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pendidikan termasuk salah satu sektor yang didesentralisasikan, sehingga sejak itu pendidikan terutama dari TK sampai dengan SMA menjadi urusan kabupaten/kota. Sedangkan pendidikan tinggi menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Sejak urusan pendidikan didesentralisasikan, signal-signal adanya banyak masalah baru sudah tampak. Diantaranya, adalah tarik menarik kepentingan untuk urusan guru serta saling lempar tanggung jawab untuk pembangunan gedung sekolah. Pengelolaan guru menjadi tarik menarik, karena jumlahnya yang banyak, sehingga banyak kepentingan politik maupun ekonomi yang bermain di dalamnya. Sedangkan pembangunan gedung sekolah, utamanya gedung SD menjadi lempar-lemparan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemda karena besarnya dana yang diperlukan untuk itu. Sementara, di lain pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Pemda sama-sama mengeluh tidak memiliki dana

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan angin segar bagi dunia pendidikan dasar dan menengah. KTSP dimaknai sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Ini berarti satuan pendidikan tertantang untuk menterjemahkan standar isi yang ditentukan oleh Kemendikbud. Bahkan diharapkan sekolah mampu mengembangkan lebih jauh standar isi tersebut.

Meskipun sekolah diberi kelonggaran untuk menyusun kurikulum, namun tetap harus memperhatikan rambu-rambu panduan KTSP yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Hal ini diharapkan agar selalu ada sinkronisasi antara standar isi dan masing-masing KTSP. Dalam prakteknya, peluang ini juga akan menghadapi kendala yang tidak ringan, *Pertama*, belum semua guru atau bahkan kepala sekolah mempunyai kemampuan untuk menyusun kurikulum. *Kedua*, semua komite sekolah atau bahkan orang

Kemendikbud belum memahami tatacara penyusunan sebuah kurikulum yang baik. *Ketiga*, kebingungan pelaksana dalam menerjemahkan KTSP.

Sudah sering dikemukakan oleh berbagai kalangan, ketidaklogisan KTSP terjadi karena seolah diberikan kebebasan untuk mengolaborasi kurikulum inti yang dibuat Kemendikbud, tetapi evaluasi nasional oleh pemerintah dengan melalui Ujian Nasional (UN) justru yang paling menentukan kelulusan siswa. Belum lagi seringnya muncul aturan baru ketika penguasa berganti padahal aturan yang sudah ada saja belum di pahami.

c. Ujian Nasional

Kebijakan pemerintah melaksanakan Ujian Nasional selalu menghadirkan pro dan kontra. Bagi yang sependapat UN merupakan wahana untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di negeri ini. Sementara bagi yang kontra, UN justru akan membebani siswa dalam belajar. Bahkan menjadi hantu yang menakutkan dan kemungkinan besar justru mematikan potensi anak. Lepas dari setuju tidak setuju, UN sebenarnya diperlukan dalam memotret pemetaan kualitas satuan pendidikan nasional. Namun yang sering dikeluhkan, kenapa UN dijadikan alat vonis penentuan kelulusan? Adilkah suka duka siswa dalam belajar selama tiga tahun hanya ditentukan nasibnya selama tiga hari pelaksanaan UN?

Kontroversi mengenai ujian nasional (UN) kebijakan ini dengan jelas menggambarkan betapa lemahnya visi pemerintah dalam kebijakan pendidikan selama ini. Visi adalah sebuah jangkauan terpanjang dari apa yang hendak dicapai dan dituju. Tetapi kalau suatu kebijakan hanya diarahkan semata-mata untuk mengejar target, di mana visi pendidikan kita yang mencerdaskan itu? Inilah yang membuat paradigma pendidikan menjadi semakin tidak jelas. Sasaran apa yang hendak dicapai?

Kita menghadapi persoalan sangat mendasar dalam konteks kebijakan ini. Apakah dengan adanya Ujian Nasional ini mutu pendidikan kita bisa ditingkatkan? Sayang sekali pertanyaan ini selalu luput dari perhatian. Mutu pendidikan bukan hanya sekedar ditentukan oleh Ujian Nasional melainkan pada paradigma pendidikan itu sendiri. Selama ini kita sering menjadikannya sebagai tolok ukur prestasi, padahal secara substansial hal itu tidak pernah menjadi bukti. Justru pendidikan kita semakin terperosok karena kebijakan tersebut selalu dibarengi dengan perilaku tak terpuji seperti korupsi, manipulasi anggaran, dan kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan untuk mempertahankan kredibilitas sekolah maupun daerah.

D. Realitas Politik Pendidikan

Sampai saat ini, realitas politik pendidikan di negara kita masih belum sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa kita lihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan sebagainya.

Pemerintah sebetulnya telah menetapkan Renstra pendidikan sejak tahun 2005–2009 dan 2009-2014 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu meningkatnya perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan, dan meningkatnya tata pemerintahan (*governance*), akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Sampai saat ini dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan pada 2012 adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar, perbaikan kurikulum pendidikan, dan tuntutan profesionalisme dan kesejahteraan guru.

Pada saat yang sama, kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Meskipun pemerintah telah menyediakan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar, masih ditemukan adanya beberapa sekolah yang masih menarik berbagai iuran, sehingga memberatkan orang tua, terutama bagi keluarga miskin. Kesenjangan partisipasi pendidikan tersebut terlihat makin mencolok pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Selain itu, ada beberapa agenda yang perlu diperhatikan untuk menentukan arah dan masa depan politik pendidikan, diantaranya adalah, *Pertama*, menghapus dikotomi dualisme penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama harus berjalan seimbang dalam hal mutu, kualitas dan kemajuannya. Sehingga tidak ada lagi pandangan bahwa pendidikan keagamaan terkesan tidak bermutu dan terbelakang.

Kedua, peningkatan anggaran pendidikan. Kita semua menyadari, bahwa untuk memajukan dunia pendidikan nasional, pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD adalah menjadi keniscayaan, jika kita betul-betul serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan, UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) telah mengamanahkannya. Namun persoalannya kemudian ketika anggaran pendidikan sudah 20% seringkali tidak tetap sasaran.

Ketiga, pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah dan pemerintah daerah harus punya kemauan kuat untuk bisa membebaskan siswa dari biaya operasional pendidikan untuk tingkat sekolah dasar dan menengah.

Keempat, perbaikan kurikulum. Pendidikan mesti diarahkan pada sistem terbuka dan multimakna serta pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Karena itu, kurikulum pendidikan harus mampu membentuk insan cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kebebasan mengembangkan potensi diri. Pendidikan juga mesti diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajarannya.

Kelima, penghargaan pada pendidik. Pemerintah harus lebih serius meningkatkan kualifikasi, profesionalisme dan kesejahteraan guru. Sebab, guru merupakan pilar utama pendidikan dan pembangunan bangsa. Tanpa guru yang profesional dan sejahtera, mustahil pendidikan kita akan maju dan berdaya saing.

Keenam, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta perluasan akses pendidikan. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah harus lebih berkonsentrasi menyediakan sarana dan prasarana sekolah khususnya daerah terpencil untuk memudahkan akses dan pemerataan pendidikan bagi warga negara, yang pada gilirannya akan meningkatkan SDM bangsa Indonesia.

SIMPULAN

Politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini.

Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus. Semenjak kemerdekaan sampai dengan era reformasi perjalanan politik pendidikan nasional telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu di era orde lama, pada tahun 1954, di era orde baru, dan saat ini di era reformasi.

Budaya politik masyarakat sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri. Hal itu bisa dipahami mengingat semakin tinggi kesempatan seseorang atau masyarakat mengenyam pendidikan, semakin tinggi pula seseorang atau masyarakat memiliki kesempatan membaca, membandingkan, mengevaluasi, sekaligus mengkritisi ruang idealitas dan realitas politik. Maka, kunci pendidikan politik masyarakat sebenarnya terletak pada politik pendidikan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. 2003, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Pranada Media)
- Ahmad Zain Sarnoto, 2012, *Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia*, *EDUCHILD*. Vol.01 No.
- Djoko Surya, 1997, *Membangun Visi ke Depan: Refleksi atas Masalah Pembangunan dalam Tantangan Pembangunan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press)
- H.A.R. Tilaar, 1999, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, (Bandung: Rosda Karya)
- Husni Rahim. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu)
- Mohammad Asrori, 2015, *POLITIK DAN PENDIDIKAN (Tinjauan Historis Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia)*, *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2 No. 1 Juli-Desember
- Mu'arif, 2008, *Liberalisasi Pendidikan. Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher)
- Suryadi, 1994, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*, (Bandung: Rosda Karya)
- Zurinal Z dan Wahdi Sayuti. 2006, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: UIN Jakarta Press)